KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lembaga Legislatif-Rakyat Perlu ditanya soal Gedung Baru
Tanggal : Kamis, 07 Mei 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEMBAGA LEGISLATIF

Rakyat Perlu Ditanya soal Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembangunan sejumlah fasilitas baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, perlu dilempar ke publik. Parlemen perlu menanyakan kepada rakyat untuk mengetahui pro dan kontra terhadap rencana tersebut.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro dalam diskusi Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/5), mengatakan, hal terpenting adalah pembangunan gedung baru itu tidak jadi proyek "bancakan" yang bisa memicu rakyat berunjuk rasa.

"Saya setuju karena sudah mau merdeka 70 tahun dan sebagai negara yang menerapkan demokrasi, ternyata rumah rakyat terbengkalai. Namun, rakyat harus ditanya supaya kita tahu seberapa banyak yang pro dan kontra," kata Zuhro.

Rencana pembangunan fasilitas baru, antara lain museum dan perpustakaan, di Kompleks Parlemen menuai kritik. Pemerintah dan DPR sudah menyetujui alokasi dana untuk desain fasilitas baru itu sebesar Rp 100 miliar dalam APBN-P 2015.

Namun, publik belum banyak mengetahui rencana desain tersebut. Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Ridwan Darmawan, peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam, Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, hingga Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri mengaku belum tahu sama sekali soal desain tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan parlemen membuka peluang untuk menggelar sayembara bagi pembangunan fasilitas baru tersebut. Sayembara merupakan salah satu upaya untuk transparansi penggunaan anggaran pembangunan Kompleks Parlemen Senayan.

"Saya juga setuju transparansi, bahkan nanti juga dapat disayembarakan. Menurut saya, yang membangun juga jangan swasta, tetapi BUMN saja sehingga uangnya kembali lagi ke negara," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli menyarankan proses desain melibatkan berbagai perguruan tinggi. Menurut Fadli, desain bangunan baru harus mengadopsi filosofi tertentu. "Juga ada kontinuitas dengan desain sebelumnya. Jadi, jangan (desain) modern sendiri dan menjadi aneh sendiri," kata Fadli.

Masih menumpang

Pembangunan gedung relatif mendesak karena selama ini DPD ternyata masih menumpang gedung MPR. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengingatkan, kebutuhan atas gedung baru bukan monopoli DPR. "DPD juga membutuhkan gedung karena selama ini kami menumpang di MPR. Tiap kali mau memakai ruang sidang paripurna, kami harus mengirim surat ke MPR. Ini lembaga negara apa?" ujarnya.

Farouk mengatakan, sempat ada ide mengakuisisi Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga yang justru minta gedung baru di kawasan Gelora Bung Karno. "Saya juga memberikan ide untuk membangun ruang publik sehingga warga yang berdemo dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. Sebaiknya, (aspirasi itu) dapat dicatat dan direkam sehingga ada komunikasi antara rakyat dan wakilnya," ujar Farouk. (RYO)